

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Uni Eropa sedang mengalami dekade yang sulit karena menderita krisis zona euro dan krisis imigrasi setelah kerusuhan di Timur Tengah (konflik Israel-Palestina). Karena krisis ini, kekuatan anti-Uni Eropa menguat tidak hanya di Britania Raya tetapi juga di negara-negara Uni Eropa lainnya, seperti Austria, Jerman, dan Italia. Dalam serangkaian peristiwa yang sulit, terlebih pada krisis ekonomi yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah, keputusan Britania Raya melalui referendum untuk meninggalkan Uni Eropa tentu menimbulkan beberapa perubahan yang cukup signifikan bagi keduanya. Britania Raya sebagai negara anggota memainkan peran penting dalam integrasi di kawasan Eropa. Hal ini tentu akan memainkan perannya dalam integrasi di pasar tunggal Uni Eropa, kebijakan sosial, dan kebijakan keadilan. Perekonomian Uni Eropa juga akan terpengaruh karena Britania Raya merupakan mitra dagang yang sangat penting serta komitmennya bagi lingkungan. Britania Raya memiliki peran penting melalui impor dan ekspor pada kawasan Uni Eropa tersebut, selain itu Britania Raya merupakan kontributor utama dalam anggaran Uni Eropa. Berangkat dari krisis tersebut, khususnya krisis imigrasi yang memprakarsai terjadinya keputusan Britania Raya keluar dari Uni Eropa (BREXIT).

Asal usul langsung dari referendum Brexit terletak pada manifesto Partai Konservatif untuk pemilihan pada tahun 2015, yang berisi janji untuk mengadakan referendum tentang keanggotaan Uni Eropa sebelum akhir tahun 2017. Melalui beberapa perundingan, prediksi bahwa kepergian Britania Raya dari Uni Eropa

akan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Uni Eropa untuk mengisi kesenjangan anggaran Uni Eropa yang disebabkan oleh Brexit.(Owen et al., 2019)

Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa tentu menimbulkan beberapa perubahan atas hubungan antara negara dengan kawasan tersebut, terlebih alasan Britania Raya keluar dari Uni Eropa diprakarsai oleh ketakutan penduduk kelas pekerja yang lebih tua di pedesaan Britania Raya akan pergerakan bebas imigran dan pengungsi yang mengklaim kesetaraan akan hak mendapatkan pekerjaan sebagai proses yang pada akhirnya menyebabkan warga negara-negara miskin tersebut mengambil alih pekerjaan, dan tunjangan penduduk lokal Britania Raya. Efek imigrasi pada pasar tenaga kerja terus menjadi salah satu bidang ekonomi yang paling diperebutkan.

Imigrasi ke Britania Raya (UK) telah meningkat secara signifikan selama 20 tahun belakangan dan hampir pasti merupakan pendorong utama yang mendukung keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa menyusul hasil referendum Inggris pada Juni 2016 lalu yang kemudian menimbulkan mediasi serta negosiasi hingga saat ini (King, 2021). Brexit memiliki dampak signifikan dalam berbagai dimensi pada integrasi Uni Eropa, hal ini akan mempengaruhi Uni Eropa, baik secara politik maupun ekonomi.

Meninggalkan Uni Eropa akan memungkinkan Britania Raya untuk 'mengambil kembali kontrol' aspek kebijakan migrasi yang sebelumnya ditentukan oleh hukum Uni Eropa. Pemerintah akan dapat melakukan pembatasan imigrasi Uni Eropa dengan cara berbeda dari beberapa dekade sebelumnya saat Britania Raya masih terikat oleh aturan kawasan. Melalui keputusan Brexit ini, bagi

pemerintah dan khususnya, Home Office United Kingdom harus melakukan perubahan aturan imigrasi untuk menunjukkan kedaulatan negara yang mutlak dan mandiri. Mengambil kembali kendali imigrasi lebih dari sekadar merancang dan menerapkan sistem imigrasi baru.

Selama 15 tahun terakhir, Inggris telah datang bergantung pada pergerakan bebas pekerja dari Uni Eropa untuk memenuhi kesenjangan keterampilan dan kesenjangan tenaga kerja. Tugas pengelolaan keimigrasian berubah total baik dalam skala maupun strategis penting setelah gerakan bebas imigrasi berakhir. Keputusan kebijakan pemerintah, yang akan membutuhkan untuk menyeimbangkan kekhawatiran pemilih dengan tuntutan bisnis akan lebih banyak lagi dampak signifikannya bagi perekonomian di Uni Eropa (Haseler, 2017).

Brexit merupakan bentuk dari taktik strategis untuk menenangkan sayap 'Eurosceptic' (golongan anti-Uni Eropa) dari Partai Konservatif untuk menetralkan meningkatnya populisme anti-Uni Eropa dari Partai Kemerdekaan Britania Raya di bawah kepemimpinan vokal Nigel Farage. Hard Euroscepticism diberi label sebagai: “penentangan berprinsip terhadap proyek integrasi Eropa berdasarkan penyerahan atau transfer kekuasaan kepada institusi supranasional seperti Uni Eropa”. (Taggart & Szczerbiak, 2018).

Britain Exit telah dibentuk oleh rasa rasisme yang mendarah daging dan oposisi terhadap imigran dan imigrasi yang telah lama hadir dalam jiwa sebagian besar penduduk Britania Raya. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena muncul kembali ledakan imigrasi pada awal dekade pasca-Perang Dunia II. Pidato 'Rivers of Blood' tahun 1968 dari politisi konservatif Enoch Powell yang merupakan satu-

satunya peristiwa yang paling menghasut ketika era itu, dengan alasan perlunya memblokir dan bahkan memulangkan imigrasi dari negara-negara Persemakmuran Britania Raya menjadi relevan pada abad ini (Dorey, 2017).

Perjanjian kemitraan ekonomi dan sosial antara Britania Raya dan Uni Eropa tidak hanya mencakup perdagangan barang dan jasa, tetapi juga mencakup berbagai bidang lain yang menjadi kepentingan kawasan Uni Eropa, seperti investasi, bantuan negara, transparansi pajak, transportasi udara dan jalan, energi yang berkelanjutan sebagai dukungan terhadap iklim, perikanan, perlindungan data, serta koordinasi jaminan sosial. Namun pada aspek sosial, Uni Eropa dan Britania Raya telah berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan kerjasama pada perlindungan yang tinggi di bidang-bidang seperti pada bidang perlindungan lingkungan, perjuangan bersama dalam mengatasi perubahan iklim serta penetapannya terhadap harga karbon, hak-hak sosial masyarakat dan tenaga kerja (termasuk migrasi), transparansi pajak dan bantuan negara dengan penegakan domestik yang efektif, mekanisme penyelesaian sengketa ini merupakan mekanisme yang mengikat dan memunculkan banyak kemungkinan bagi kedua belah (antara Britania Raya dan Uni Eropa) merupakan pihak yang sama-sama berupaya mengambil tindakan perbaikan.

Keluarnya Britania Raya dari Kawasan Uni Eropa ini menimbulkan perubahan pada aturan imigrasi yang menyangkut aturan bagi warga negara anggota Uni Eropa yang bekerja, bepergian, atau pindah ke Britania Raya yang resmi diberlakukan pada 1 Januari 2021. Pada perjanjian terakhir tersebut, memungkinkan bahwa Britania Raya akan terus berpartisipasi dalam sejumlah program unggulan regional Uni Eropa untuk periode 2021 hingga 2027 (tergantung

pada kontribusi keuangan Inggris untuk anggaran keuangan Uni Eropa), seperti Horizon Eropa. Kesepakatan itu berisi aturan baru tentang bagaimana Britania Raya dan Uni Eropa akan hidup, bekerja, dan berdagang bersama.

Pada tahap pertama yang akan terjadi pasca Britain Exit adalah stabilitas kerjasama ekonomi di Uni Eropa akan berdampak pada hal-hal jenis bisnis yang beroperasi di berbagai bagian negara dan bagaimana caranya kesepakatan yang dicapai dengan Uni Eropa mempengaruhi sektor-sektor tertentu. Kedua, berapa banyak bisnis di masing-masing wilayah bergantung pada impor dari dan ekspor ke Uni Eropa. Ketiga, seberapa mudah setiap area dapat beradaptasi dengan pembaharuan aturan sesudah Brexit, termasuk apakah pekerja asing yang dipindahkan dari satu industri akan mudah atau sulit dalam mencari pekerjaan baru di tempat lain (Jacobs, 2018).

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis merasa bahwa penting untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh Brexit baik bagi Britania Raya sebagai kepentingan nasionalnya serta dampak ekonomi bagi masyarakat Uni Eropa yang terbiasa akan adanya Gerakan “Free Movement”. Maka penulis mengajukan judul sebagai berikut: Dampak Britain Exit Terhadap Perubahan Aturan Imigrasi Britania Raya Bagi Investor Uni Eropa.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka perlu bagi penulis untuk membangun identifikasi masalah dalam rangka memfokuskan pada inti-inti persoalan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah yang ditulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi Britania Raya dalam memisahkan diri dari Uni Eropa?
2. Bagaimana aturan Imigran Uni Eropa bagi perkembangan investasi Britania Raya di Uni Eropa?
3. Bagaimana dampak Britain Exit terhadap perubahan aturan Imigrasi bagi investor asing di Britania Raya?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang penulis paparkan diatas, penulis merasa penting untuk membuat pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus. Penelitian ini akan dibatasi sepanjang pembahasan dan kajian seputar dampak Brexit terhadap pembaharuan aturan Imigrasi bagi masyarakat Uni Eropa di Britania Raya serta dampaknya bagi investor asing asal Uni Eropa di Britania Raya. Adapun periode penelitiannya pada tahun 2015 hingga tahun 2021 dengan alasan referendum awal yang terjadi pada tahun 2015 hingga keputusan sah terjadinya Brexit pada tahun 2021 dan perubahan *continuous*.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dijelaskan diatas, agar mempermudah dalam pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai

berikut: “Bagaimana dampak Brexit terhadap perubahan aturan imigrasi yang melingkupi Visa dan Izin Tinggal di Britania Raya bagi investor Uni Eropa”

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Dalam membuat sebuah penelitian sudah seharusnya memiliki tujuan dan kegunaan yang dapat bermanfaat bagi Negara dan masyarakat, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepentingan apa yang melatar-belakangi terjadinya Britain Exit
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan aturan imigrasi di Britania Raya bagi stabilitas ekonomi Uni Eropa
3. Untuk mengetahui bagaimana aktifitas kerjasama ekonomi khususnya investasi asing bagi Britania Raya - Uni Eropa pasca Brexit.

#### **1.3.1 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang adanya perubahan aturan imigrasi di Britania Raya bagi imigran Uni Eropa serta dampaknya pada ekonomi negara dan kawasan tersebut.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1, yakni dengan membuat suatu karya ilmiah yang

menjadi salah satu syarat pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.

- b. Memberikan manfaat positif, baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi serta bagi penulis pada khususnya; dan
- c. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan dan bermanfaat bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Dampak Britain Exit terhadap perubahan Aturan Imigrasi Britania Raya bagi Ekonomi Masyarakat Uni Eropa.